

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang gagasan dan rasionalisasi dilakukannya penelitian mengenai transformasi nilai kesukarelaan sebagai basis *political engagement* melalui *service learning*, meliputi; latar belakang dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian baik yang sifatnya umum maupun khusus, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta struktur organisasi disertasi yang menjelaskan mengenai bagian-bagian yang akan dituangkan dalam laporan penelitian disertasi.

A. Latar Belakang

Keberhasilan penerapan demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif warganegara yang ditunjukkan oleh keterlibatan individu dalam proses politik. Bicara mengenai partisipasi politik tidak hanya terbatas pada memberikan pilihan pada pelaksanaan pemilihan umum saja, melainkan merupakan suatu definisi yang lebih luas dan kompleks pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, maka partisipasi tidak hanya berada pada level kognitif dan afektif ikhwal pentingnya keterlibatan individu dalam proses politik, tetapi sudah melembaga dalam bentuk perilaku sehari-hari warganegara.

Penelitian ini berangkat dari hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap beberapa hasil penelitian dan informasi yang tersebar di media yang menunjukkan semakin menurunnya keterlibatan mahasiswa dalam politik. Kesatu, penelitian yang dilakukan Muslim, dkk (2014, hlm.35) menemukan bahwa hingga saat ini mahasiswa belum sepenuhnya memahami secara substansial mengenai identitas akademik, sosial dan intelektual yang melekat pada dirinya. Adanya kegagalan pemahaman akan identitas tersebut berkontribusi besar terhadap semakin lunturnya pemikiran dan perilaku kritis di kalangan mahasiswa. Mahasiswa seakan lupa mengenai eksistensi dirinya dan mengalami disorientasi tujuan mereka mengenyam pendidikan tinggi. Penyimpangan sikap, gaya hidup, pencapaian cita-cita yang tinggi tanpa didasari usaha nyata dan integritas

kehidupan mahasiswa yang tidak lagi mencerminkan perjuangan mahasiswa itu sendiri.

Kedua, Putra sebagaimana dimuat harian okezone (tersedia dalam <http://news.okezone.com/read/2012/08/02/95/672169/mahasiswa-baru-di-tengah-kepuungan-apatisme>, diakses tanggal 9 Juli 2015) menunjukkan bahwa apatisme terhadap permasalahan kehidupan masyarakat merupakan salah satu “penyakit” yang melekat pada kebanyakan mahasiswa. Semakin merebaknya virus apatisme yang diidap mahasiswa dapat diamati dari sikap mahasiswa yang acuh dan masa bodoh terhadap kegiatan-kegiatan positif, seperti terlibat dalam berbagai forum diskusi, keterlibatan dalam mengurus komunitas belajar, keterlibatan dalam program pengabdian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Sikap acuh mahasiswa terhadap berbagai isu yang berkembang, baik yang muncul di dalam kampus maupun lingkungan sosial yang lebih luas dinilai sebagai sebuah krisis yang harus segera dicari pemecahannya.

Terkait dengan hal tersebut, posisi dan kekuatan perguruan tinggi menjadi penting keberadaannya terutama dalam menumbuhkembangkan kesadaran politik mahasiswa untuk dapat berkontribusi secara langsung dalam program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu aspek tri dharma perguruan tinggi. Tuntutan ini menjadi sangat krusial mengingat pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, karena itu diperlukan suatu formula yang tepat untuk membekali mahasiswa menjadi agen perubahan (*agen of change*) yang hakiki. Predikat sebagai *agen of change* ditegaskan Bantahari (2005, hlm.3) mengandung makna bahwa mahasiswa merupakan sosok warga negara yang memiliki tanggung jawab penuh, dan karenanya menentukan masa depan bangsa. Secara futuristik, kebangkitan dan keterpurukan di masa depan berkaitan erat dengan kondisi mereka sebagai *agen of change* saat ini.

Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara ideal menuntut seorang mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar yang cerdas dari segi akademik, tetapi juga sebagai individu yang mampu berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan nasional. Karena itu, tugas mahasiswa tidak hanya sebagai pencari ilmu melainkan sebagai pengabdian masyarakat yang berkualifikasi baik.

Peningkatan peran mahasiswa sebagai pengabdian masyarakat, memerlukan suatu proses penanaman dan penumbuhkembangan jiwa pelayanan bagi masyarakat (*public service*) yang dilandasi rasa dan keinginan kuat untuk saling berbagi dengan sesama, karena itu semangat voluntarisme mutlak diperlukan dalam prosesnya.

Mahasiswa sebagai generasi pembaharu harus memiliki spirit pelayanan yang kuat bagi masyarakat, karena sampai detik ini mahasiswa masih memiliki tempat sebagai aktor intelektual yang dipercaya dapat membawa perubahan kehidupan kearah yang lebih baik. Posisi akademisi merupakan salah satu elemen tak terpisahkan dari upaya pembangunan sebuah bangsa, karena itu dipandang perlu mempunyai kemampuan yang tidak hanya berkutat pada tataran teoritis melainkan lebih kepada tataran praktis yang bertuju pada pengokohan jatidiri civitas akademik sebagai pengabdian masyarakat. Kaitan dengan itu, mahasiswa setidaknya mempunyai peran dan posisi sebagai gerakan intelektual, gerakan moral, dan gerakan sosial.

Pertama, sebagai gerakan intelektual menempatkan mahasiswa sebagai pemikir yang harus bergerak dengan kefahaman. Mengkaji berbagai ilmu pengetahuan dengan penuh kesadaran akan pentingnya pengembangan ilmu dalam kehidupan yang pada akhirnya mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kompetensinya masing-masing. *Kedua*, sebagai gerakan moral sudah semestinya mahasiswa terlibat dalam aktivitas-aktivitas pembangunan moral masyarakat yang dipastikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (termasuk mahasiswa). Sebagaimana kita ketahui bahwa standar moralitas masyarakat tengah mengalami degradasi sampai sedemikian rendahnya, karena itu mahasiswa yang notabene seorang intelektual seharusnya mampu merekonstruksi kembali definisi ini pada standar nilai semestinya. *Ketiga*, sebagai gerakan sosial mahasiswa mempunyai peluang besar untuk ikut andil dalam kehidupan politik di negaranya, baik kaitannya dengan proses pengawasan (mengkritik penguasa jika salah dan mematuhi/mendukung jika pemerintah benar) bahkan menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan peranan dan kapasitasnya masing-masing (mahasiswa sebagai *social control*).

Ketiga peran dan posisi sebagaimana diurai di atas, nampaknya saat ini sudah mulai langka, bahkan hilang dalam kehidupan mahasiswa. Karena itu, perlu dilakukan pengembangan kemampuan dan keterampilan mahasiswa utamanya agar dapat berguna bagi masyarakat. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah mengembangkan *service learning* di perguruan tinggi, karena pada dasarnya tugas mahasiswa adalah mengabdikan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Service learning dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, pertama kali dikembangkan oleh Gardner (dalam Stewart, 2012, hlm. 50) yang menjelaskan “*Through service-learning, students share “common” experiences and thereby feel connected, and feel like they matter to other students and their instructors*”. Melalui pengertian ini, Gardner menegaskan bahwa melalui pembelajaran layanan (*service learning*) ini, siswa berbagi pengalaman secara umum, dengan demikian mereka merasa terhubung dan merasa peduli terhadap siswa lain dan instruktur mereka.

Pengembangan *service learning* di perguruan tinggi diperlukan dalam rangka implementasi tri dharma perguruan tinggi serta memperkuat pembelajaran berbasis masyarakat. Selaras dengan itu, maka Notonegoro (1985, hlm.22) memandang perlunya suatu upaya *transpolitisasi* di perguruan tinggi, yakni kegiatan memberi kesadaran politik bagi mahasiswa melalui pendidikan politik. Kegiatan transpolitisi ini dimaksudkan untuk mendukung tridharma perguruan tinggi yang dalam praksisnya dilaksanakan melalui serangkaian program yang saling berkaitan (*interlocking*) baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan merupakan tanggung jawab penuh universitas.

Melalui kegiatan *service learning*, diharapkan mahasiswa memiliki jiwa dalam melayani masyarakat sekaligus menumbuhkan keinginan kuat untuk belajar dari masyarakat. Atas dasar itulah, *service learning* merupakan suatu metode pengajaran yang banyak digunakan di perguruan tinggi diberbagai negara. Hal ini dikarenakan aktivitas *service learning* dapat menggambarkan suatu kondisi masa depan yang memperlihatkan pengabdian kepada masyarakat yang orisinal, inovatif serta menentukan bagi pembangunan nasional.

Pembelajaran di perguruan tinggi akan lebih baik dan bermakna jika mahasiswa belajar di masyarakat, karena setelah lulus di perguruan tinggi mahasiswa akan kembali lagi ke kehidupan yang lebih kompleks di masyarakat yang secara otomatis memerlukan bekal terutama dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Melalui pengalaman yang diperoleh melalui aktivitas komunitas pengabdian terhadap masyarakat ini, dapat mengkatalisasi pengembangan pribadi dan berkontribusi terhadap pengembangan warganegara yang lebih bertanggungjawab.

Sebagaimana dijelaskan Wynsberghe & Andruske (2007, hlm. 351) bahwa *“students would better encode information for long-term retrieval, catalyze personal development by absorbing their experiences and lessons through first-hand experiences, and contribute civically to their communities thereby becoming more responsible citizens”*. Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam *service learning* melalui pengembangan aktivitas komunitas mengalami peningkatan wawasan dan kesadarannya terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya.

Asumsi sebagaimana tersurat di atas, berangkat dari hasil penelitian Melchior & Bailis (2002, hlm. 222) yang menemukan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam *service learning* telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan, keterlibatan sipil dan kesadaran akan isu sosial. Pembelajaran *service learning* merupakan kombinasi tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aspek pengembangan kepribadian.

Pola ini merupakan perimbangan antara pembelajaran di perkuliahan dengan pengembangan *“soft skill”* mahasiswa yang lebih menekankan pada refleksi setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. Misalnya pembelajaran pendidikan politik yang diperoleh oleh mahasiswa pendidikan kewarganegaraan, tidak hanya berbicara mengenai untai konsep pendidikan politik melainkan lebih kepada bagaimana mahasiswa menemukan dan melaksanakan suatu format pendidikan politik bagi masyarakat dalam upaya menumbuhkan partisipasi politik warganegara. Hal itu dinilai lebih bermakna dibandingkan hanya berkutat pada tataran konsep semata.

Secara konseptual-teoritis *National Service Learning Clearing House* (tersedia dalam <http://uca.edu/servicelearning/types>, diakses tanggal 4 Agustus 2015) mengembangkan *service learning* menjadi empat bentuk, yakni; *direct service learning*, *indirect service learning*, *research-based service-learning*, dan *advocacy service learning*. Kesatu, *direct service learning* merupakan pemberian layanan secara langsung yang diberikan seorang siswa terhadap siswa lainnya, misalnya; siswa kelas atas membimbing siswa kelas bawah, melaksanakan pelatihan seni atau musik untuk anak remaja, memberikan penyuluhan tentang kekerasan dan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya. Bentuk *service learning* semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah pemberian layanan kepada orang lain yang dalam praksinya dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

Kedua, *indirect service learning* merupakan bentuk pemberian layanan yang berfokus pada isu-isu yang lebih luas, proyek-proyek lingkungan, atau proyek pengembangan masyarakat. Kegiatan *service learning* ini sekalipun mempunyai manfaat yang jelas bagi masyarakat dan atau lingkungan, akan tetapi para siswa tidak harus mengidentifikasi dan menentukan secara spesifik dengan siapa dan untuk apa mereka berkerja, misalnya menelusuri dan menyusun sejarah kota, memulihkan keberfungsian bangunan-bangunan bersejarah yang sudah mulai dilupakan, memulihkan ekosistem lingkungan (seperti; taman kota) untuk keperluan umum, dan lain sebagainya.

Ketiga, *research-based service-learning* merupakan bentuk layanan yang dilakukan melalui pengumpulan dan penyajian informasi terkait bidang-bidang strategis yang diperlukan oleh masyarakat umum, misalnya; menerjemahkan buku referensi berbahasa inggris dalam bahasa Indonesia sehingga dapat mudah digunakan oleh masyarakat yang mempunyai keterbatasan berbahasa inggris, melakukan studi longitudinal dan pengujian kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai pemetaan tanah milik pemerintah, melakukan pemantauan flora dan fauna, dan lain sebagainya.

Keempat, *advocacy service-learning* merupakan bentuk layanan kepada masyarakat dengan tujuan mendidik masyarakat untuk membangun kesadaran dan tindakan pada beberapa masalah yang berdampak pada masyarakat. *Service*

learning semacam ini dapat berwujud seperti; merencanakan dan membuat forum-forum diskusi di masyarakat yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan pentingnya swadaya, memberikan masukan dan bekerjasama dengan pemerintah dalam merancang undang-undang yang selaras dengan kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain keempat bentuk *service learning* di atas, Butin (2010, hlm.50) menjelaskan *service learning* dilihat dari aspek epistemologis terbagi menjadi tiga bentuk, yakni; *technical*, *cultural*, dan *political* yang masing-masing mempunyai asumsi epistemologis yang berbeda. *Technical service learning* mengasumsikan fenomena masyarakat sebagai laboratorium pembelajaran, *cultural service learning* mengasumsikan perlunya pembelajar melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat karena penghargaan akan nilai-nilai pluralisme sangat rendah, sedangkan *political service learning* mengasumsikan adanya kebenaran dogmatis yang berkembang di masyarakat yang oleh karena itu perlu diberikan upaya-upaya penyadaran dan sosialisasi guna mengubah cara berpikir dogmatis itu. Ketiga bentuk *service learning* ini berfungsi sebagai sebuah mekanisme yang membantu pembelajar untuk bergerak dari tindakan individual menuju tindakan kolektif untuk mengatasi pelbagai masalah sosial di masyarakat.

Service learning dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan berbagai hal yang dapat dilakukan, utamanya bertuju pada berkembangnya semangat berbagi dengan sesama secara sukarela dikalangan mahasiswa. Semangat kesukarelaan dapat lahir ketika seseorang melihat kondisi lingkungan sekitarnya yang tidak sesuai dengan idealitas. Sebagaimana dijelaskan Hilman (2010, hlm. 46) bahwa sikap yang muncul dalam gerakan voluntarisme adalah munculnya sikap peduli dan rasa ingin melakukan sesuatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan barangkali ada keinginan untuk mengubah kondisi lingkungannya menjadi lebih baik.

Service learning memberikan kesempatan sekaligus pengalaman kepada mahasiswa untuk lebih mengerti dan memahami permasalahan kesadaran politik warganegara yang sampai saat ini masih berada dalam taraf yang minim secara nasional. Pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk berbagi pengetahuan mengenai urgensi partisipasi sebagai warganegara yang bertanggungjawab.

Kaitan dengan itu, Universitas Pendidikan Indonesia terus berupaya menciptakan kualitas mutu lulusan khususnya dalam bidang pendidikan. Terdapat berbagai fakultas dengan ragam jurusan dan program studi di dalamnya yang satu sama lain mempunyai karaktersitik masing-masing, baik dilihat dari kultur akademik maupun latar keilmuannya termasuk kebermanfaatan ilmu dan pengetahuan yang dipelajari bagi masyarakat kedepan.

Ragam jurusan dan program studi dengan kualifikasi keilmuan yang berbeda merupakan sebuah peluang dikembangkannya *service learning* melalui pembentukan komunitas-komunitas pengabdian yang berasal dari mahasiswa. Perlunya membangun komunitas-komunitas pengabdian dikalangan mahasiswa merupakan sebuah upaya implementasi pengajaran pengalaman berbasis masyarakat dan kewarganegaraan demokratis. Sebagaimana dikemukakan Dewey (2004, hlm. 19a) bahwa “*learning by doing permitted students to bring to life the esoteric concepts to which they were being exposed in classrooms*”. Melalui *learning by doing*, mahasiswa diizinkan untuk menghidupkan konsep esoteris yang dipelajari dalam perkuliahannya di kelas.

Salah satu model *service learning* yang dikembangkan di Universitas Pendidikan Indonesia adalah Kuliah Kerja Nyata yang dalam praksisnya wajib diikuti oleh mahasiswa semester enam. Apabila dilihat dari bentuk-bentuk *service learning* yang dikembangkan sebagaimana telah dijelaskan, Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan Universitas Pendidikan Indonesia merupakan kombinasi dari *direct service learning*, *research-based service learning*, dan *advocacy service learning* (NSLCH, 2015) yang secara epistemologis termasuk dalam kategori *technical* dan *political service learning* (Butin, 2010). Asumsi ini setidaknya didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut.

Kesatu, dikatakan *direct service learning* karena selama 40 hari kelompok mahasiswa tinggal bersama dalam satu rumah untuk merumuskan segala aktivitas dalam kaitannya dengan perbaikan mutu kehidupan masyarakat. Secara internal, dalam praksisnya seringkali terjadi diskusi diantara kelompok mahasiswa dan biasanya mahasiswa dinilai mempunyai kelebihan dipilih menjadi ketua kelompok yang dapat membimbing, mengarahkan, dan *center of information* bagi rekanrekan anggota kelompoknya. Selain itu, secara eksternal dilihat dari

program-program yang dilakukan ditemukan terdapat beberapa program yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat, seperti; penyuluhan narkoba dan seks bebas bagi pelajar, pelatihan kewirausahaan masyarakat, pelatihan kepemudaan, dan lain sebagainya.

Kedua, *research-based service-learning* dimana sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa biasanya melakukan studi pendahuluan, analisis situasi dan analisis masalah yang ada di lokasi KKN. Hasil kajian awal tersebut dijadikan dasar oleh mahasiswa dalam merancang program yang tepat untuk diterapkan guna menghadapi masalah yang ada di masyarakat, selain itu temuan-temuan tersebut disosialisasikan baik melalui kepala desa ataupun secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk secara bersama melakukan upaya-upaya perbaikan.

Ketiga, *advocacy service-learning* yang dalam praksisnya terlihat dapat dilihat dari kegiatan diskusi komprehensif mengenai situasi, kondisi, potensi, dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Berangkat dari hasil diskusi tersebut, kemudian kelompok mahasiswa dapat menjembatani masyarakat dengan pemerintah dengan tujuan lahir sebuah regulasi/kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keempat, dikatakan *technical service learning* karena konstruksi yang dibangun oleh Kuliah Kerja Nyata adalah memposisikan masyarakat sebagai laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa. Melalui Kuliah Kerja Nyata, mahasiswa tidak hanya berkutat pada tataran teori bermasyarakat melainkan mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari tersebut dalam praktek bermasyarakat.

Kelima, dikatakan *political service learning* karena tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas atau program-program yang dilaksanakan kelompok mahasiswa turut berkontribusi dalam upaya mengubah cara berpikir masyarakat, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan. Ini penting, karena mahasiswa hanya beberapa hari saja tinggal menemani dan membantu masyarakat secara langsung. Harapannya, setelah kegiatan selesai dan mahasiswa kembali ke kampus, masyarakat dapat secara mandiri dan bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Secara filosofis, dilaksanakannya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa mempunyai beberapa kegunaan yakni (1) Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat, (2) Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral, (3) Menumbuhmatangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan serta masa depan bangsa dan negara, (4) Menciptakan sinergitas positif antara universitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat.

Akan tetapi, sekalipun *service learning* yang diwujudkan melalui Kuliah Kerja Nyata secara konseptual baik, namun berdasarkan pengamatan peneliti, dalam praksisnya belum ada program yang secara spesifik mengembangkan keterlibatan warganegara dalam politik (*political engagement*). Jika dilihat dari pembagian wilayah Kuliah Kerja Nyata yang selama ini dilakukan, sebenarnya merupakan sebuah peluang untuk memperkaya kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Akan tetapi substansi program belum mengarah pada terbangunnya keterlibatan aktif warganegara dalam politik sebagai prasyarat utama terbangunnya demokrasi. Disamping itu, paradigma **“yang penting melaksanakan dan mendapat nilai”** merupakan cara berpikir yang harus diubah karena hanya akan menjadikan KKN sebagai ritual dan menggugurkan kewajiban akademik semata, tanpa makna yang diperoleh.

Berdasarkan pada hasil pra penelitian yang dilakukan, peneliti memandang perlu dilakukan rekonstruksi model *service learning* yang dilakukan perguruan tinggi sehingga semakin jelas kontribusinya, terutama dalam membangun suatu masyarakat partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bagi mahasiswa sebagai pembelajar yang harus terus mengembangkan kepribadian disamping keilmuan yang dipelajari maupun bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dari program yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia disusun secara tematik meliputi beberapa bidang, yaitu Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA), Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lingkungan Hidup (LH), Kearifan Budaya Lokal (KBL), Keaksaraan Fungsional (KF), dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas). Melalui beberapa program Kuliah Kerja Nyata (KKN), konsepsi mengenai *political engagement* bukan hanya terbatas pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum yang secara riil merupakan praktek politik. Lebih daripada itu, *political engagement* diartikan sebagai keterlibatan warganegara (mahasiswa) dalam mempercepat proses pembangunan, sehingga tercipta suasana kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan **warganegara fungsional** sebagaimana yang dicita-citakan. Berdasarkan rasionalisasi tersebut, maka model *service learning* melalui pembentukan komunitas tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan *political engagement* di kalangan mahasiswa yang sudah mulai luntur.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) harapannya dapat menjadi salah satu media penguatan *political engagement* di kalangan mahasiswa, mengingat pelbagai gejala menunjukkan adanya distorsi peran dan fungsi mahasiswa sebagai *agent of change*, *iron stock* dan *social control* yang sudah mencuat ke permukaan. Maka dengan demikian, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan bangsa. Bertitik tolak dari berbagai permasalahan, data, fakta dan rasionalisasi tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam ikhwal efektivitas model *service learning* di perguruan tinggi dalam membangun keterlibatan warganegara dalam politik (*political engagement*).

Penelitian ini berupaya menggali konstruksi model *service learning* berbasis komunitas dalam kaitannya dengan peningkatan *political engagement* di kalangan mahasiswa yang setidaknya diilhami oleh dua hal. Kesatu, konsepsi *voluntarisme* (kesukarelaan warga) sebagai akar demokrasi dan partisipasi politik sebagai wujud warganegara fungsional dan bertanggungjawab bertolakbelakang dengan realitasnya, karena apatisisme politik, rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam perbaikan mutu kehidupan masyarakat, serta pemahaman pragmatis akan identitas akademik, sosial dan intelektual semakin menunjukkan eksistensinya.

Kedua, *service learning* yang diwujudkan melalui Kuliah Kerja Nyata dipandang sebagai suatu formulasi guna meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam perbaikan mutu kehidupan masyarakat yang secara konseptual mengintegrasikan lima bentuk dalam *service learning*, yakni; *technical service learning*, *political service learning*, *direct service learning*, *research-based service-learning*, dan *advocacy service-learning*. Dua alasan tersebut semakin memperkuat peneliti untuk melakukan studi penelitian dengan *problem statement* “**Transformasi Nilai Kesukarelaan sebagai Basis *Political Engagement* melalui *Service Learning* di Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Kasus pada Pelaksanaan KKN di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat)**”.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian yang akan dilakukan peneliti muncul berdasarkan hasil identifikasi dari sejumlah permasalahan. *Pertama*, sebagian besar mahasiswa lebih fokus pada aktivitas akademik dan cenderung melupakan kewajiban sosialnya kepada masyarakat. *Kedua*, pembelajaran *service learning* yang berorientasi pada peningkatan kontribusi nyata mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali tidak berangkat dari hasil analisis terhadap kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, program-program yang dirancang belum mengarah pada penguatan keterlibatan warganegara dalam politik (*political engagement*). *Keempat*, program-program yang dilaksanakan mahasiswa kebanyakan hanya terbatas pada menggugurkan kewajiban semata dan kurang memberikan kontribusi positif terutama dalam pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, kelompok kerja *service learning* hanya berjalan ketika mengikuti perkuliahan saja (tidak berkesinambungan). *Keenam*, perlunya penguatan kontribusi *community service learning* dikalangan mahasiswa dalam meningkatkan keterlibatan politik warganegara (*political engagement*).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah transformasi

nilai kesukarelaan sebagai basis *political engagement* melalui model *service learning*. Untuk mempermudah proses penelitian, penulis mengidentifikasi masalah kedalam beberapa rumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimana realitas *political engagement* dikalangan mahasiswa dan model pembelajaran *service learning* yang saat ini dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk transformasi nilai kesukarelaan sebagai basis *political engagement* melalui *service learning*?
- c. Bagaimana pandangan para pakar mengenai penguatan *political engagement* di kalangan mahasiswa melalui *service learning* di Perguruan Tinggi?
- d. Konstruksi pembelajaran *service learning* yang bagaimanakah yang dapat mengembangkan *political engagement* dikalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menemukan, dan mengembangkan model *service learning* di perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan *political engagement* berbasis nilai kesukarelaan dikalangan mahasiswa sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi penerapan model pembelajaran *service learning* yang tepat untuk diterapkan dan dikembangkan di universitas, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia umumnya di berbagai universitas lain yang ada di Indonesia dan di dunia.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah sebagaimana tersurat di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengidentifikasi informasi argumentatif mengenai:

- a. Realitas *political engagement* dikalangan mahasiswa dan model pembelajaran *service learning* yang saat ini dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. Bentuk transformasi nilai kesukarelaan sebagai basis *political engagement* melalui *service learning*.

- c. Pandangan para pakar mengenai penguatan *political engagement* di kalangan mahasiswa melalui *service learning* di Perguruan Tinggi.
- d. Konstruksi pembelajaran *service learning* dalam mengembangkan *political engagement* di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pengembangan konseptual model *service learning* di perguruan tinggi yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kekuatan perguruan tinggi dalam mencetak insan akademis yang mampu memberikan kontribusi riil dalam membangun, memberdayakan serta menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat terutama terkait dengan peningkatan keterlibatan warganegara dalam politik. Hasil penelitian dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan terkait dengan (a) Kerangka konseptual-filosofis pembelajaran *service learning* di perguruan tinggi dalam mengembangkan *political engagement* berbasis nilai kesukarelaan (b) Kerangka teoritik model pembelajaran *service learning* di Universitas Pendidikan Indonesia melalui pengembangan komunitas, (c) Kerangka teoritik konseptual kekuatan komunitas mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) terutama terkait dengan peningkatan keterlibatan warganegara dalam politik.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

- a. Ditemukannya konseptualisasi model *service learning* di perguruan tinggi yang dapat dijadikan kerangka analisis pengembangan *political engagement* berbasis nilai kesukarelaan di kalangan mahasiswa.
- b. Dihasilkannya *grand desain* model *service learning* di Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan *political engagement* yang berbasis pada hasil riset dan pengkajian secara komprehensif.

- c. Terbentuknya komunitas mahasiswa dalam mendukung keberhasilan program *service learning* di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai upaya meningkatkan *political engagement*.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti pola yang diterapkan di Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab I pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan landasan penelitian dilakukan disertai rasionalitas yang menekankan perlunya studi mendalam ikhwil masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yakni; latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II kajian pustaka, pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep, generalisasi, dan teori yang dianggap relevan dan akan digunakan dalam mengkaji hasil penelitian baik berasal dari hasil telaah terhadap buku-buku referensi maupun berangkat dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil telaah sebagaimana dimaksud terdiri dari; kajian konseptual model *service learning* di perguruan tinggi, makna dan hakikat *political engagement*, makna dan hakikat *community service learning*, serta keterkaitan antara pembelajaran *service learning*, *community service learning* dengan *political engagement*. Selain itu, pada bagian ini disarikan pula beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

Bab III metode penelitian, pada bagian ini dijelaskan desain dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertai rasionalisasi dipilihnya desain dan pendekatan dimaksud. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data, analisis data dan penentuan subjek serta lokasi penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bagian ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian yang mengacu pada perumusan masalah pada bab I dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil penelitian tersebut disandingkan dengan

teori-teori yang relevan untuk kemudian diperoleh suatu teori dasar (*grounded theory*) yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan kedepan yang berangkat dari realitas.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, pada bagian ini dijelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan temuan penelitian dan dimaksudkan sebagai jawaban dari aspek yang dikaji. Selain itu, pada bab ini dijelaskan pula implikasi penelitian baik dalam kaitannya terhadap pengembangan keilmuan maupun dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Temuan-temuan dan implikasi penelitian menghasilkan gagasan-gagasan peneliti yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dikaji.